STRATEGI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PERBUATAN ASUSILA DI TEMPAT OBJEK WISATA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

FERA RIMA SARI
05 193 012

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

ABSTRAK

FERA RIMA SARI (05193012) Judul Skripsi: Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemberantasan Perbuatan Asusila Di Tempat Objek Wisata. Jurusan ilmu politik Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Andalas Padang. Dibawah bimibingan Drs, Tamrin, M. Si dan Doni Hendrik, S,ip , M soc, Sc

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberantas perbuatan asusila perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang tentraman dan tertib dapat direalisasikan. Sehingga untuk dapat mengatur dan memberantas penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut, maka pemerintah Kota Bukittinggi beserta DPRD mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Permasalahan dalam skripsi penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah kota Bukittinggi mengimplementasikan kebijakan pemberantasan perbuatan asusila di tempat objek wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya-upaya dalam memberantas perbuatan asusila di tempat objek-objek wisata dan mengambarkan strategi dan implementasi kebijakan yang berupa peraturan daerah pemerintah kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003 tentang penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat melalui faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian desktiptif. Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Data di kumpul dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan konsep strategi yang dikemukakan oleh Clausewitz dan melihat keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan sesuai denga teori menurut Van Meter dan Van Horn.

Dari hasil penelitian adanya strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberantasan asusila di tempat objek wisata. Strategi yang dilakukan pemko adalah membuat kebijakan untuk memberantas perbuatan asusila sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat, meningkatkan intensitas razia, melakukan tindakan hukum yang tegas dan pemberian hukuman maksimal bagi pelaku yang berbuat asusila di tempat objek wisata, melibatkan seluruh instansi atau komponen masyarakat untuk membantu pelaksanaan pemberantasan perbuatan asusila di tempat objek wisata. Implementasi kebijakan dalam pemberantasan perbuatan asusila dilakukan dengan cara melihat faktor keberhasilan sebagaimana sasaran tujuannya menciptakan Kota Bukittinggi bebas dari maksiat, sumber daya yang dimiliki pemerintah saling bekerja sama dalam mencapai tujuan akhir, sebagai karakteristik agen pelaksana apabila terjadi pelanggaran maka dilakukan sebagimana dalam proses pemanggilan sampai persidangan. Adapun hasil dari penelitian ini terdapat hambatan diantaranya kurangnya perhatian dan keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam pengawasan pemberantasan perbuatan asusila, dana yang disediakan dari dana anggaran satuan kerja (DASK) untuk Satpol PP terbatas, adanya pihak yang menjadi pelindung terhadap pelaku asusila, dan ada pemerasan yang dilakukan anggota Satpol PP saat melakukan razia di objek wisata.

Kata kunci : Strategi, Kebijakan, Implementasi Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang memiliki julukan sebagai kota wisata. Dimana di kota ini pariwisata sudah menjadi industri, namun sektor ini sangat rentan terhadap beragam isu, dari sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan fisik hingga kondisi keamanan negara. Ada beberapa asumsi bahwa sektor pariwisata memiliki posisi yang penting di Kota Bukittinggi; Pertama pariwisata merupakan salah satu produk andalan Kota Bukittinggi selain sektor perdagangan dan jasa, sektor pendidikan dan sektor pelayanan kesehatan. Kedua faktor pariwisata mempengaruhi penerimaan dari pajak dan retribusi yang terkait dengan pariwisata terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD).

Ketiga Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan daerah tujuan utama wisata memiliki potensi pariwisata yaitu objek-objek wisata, akomodasi dari rumah makan, Pramuwisata dan komponen industri pariwisata lainnya. Dan yang keempat Kota Bukittinggi tertelak pada posisi silang yang strategis pada ruas jalan trans sumatera dengan topografi berbukit dan berlembah, keadaan alam yang indah dan udara yang sejuk sepanjang tahun dan tersedianya sarana dan parasarana kepariwisataan dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik.

Keindahan alam dan budaya Kota Bukittinggi memang sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik wisata gunung, bahari maupun *eco tourism*. Selama ini masyarakatnya dikenal kuat dengan agama dan adat. Namun

seiring perkembangan zaman ditandai dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang, secara tidak langsung membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat di daerah ini yang menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di era otonomi dan reformasi ini, semakin dirasakan perlunya kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan menjunjung tinggi supermasi hukum. Yaitu suatu kondisi dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan stabilitas politik di daerah. Oleh karena itu diperlukan penanganan secara kontinyu, terpadu, dan terencana oleh pemerintah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban ini. Mengingat luasnya daerah untuk lebih menjamin terpeliharanya kondisi ketentraman dan ketertiban di daerah, maka untuk membantu kepala daerah menyelenggarakan pembinaan ketentaraman dan ketertiban umum serta penengakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

Pada masa sekarang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan kemajuan pengetahuan, dan teknologi dan era globalisasi telah memberikan efek yang negatif terhadap masyarakat Bukittinggi, hal ini ditandai makin maraknya

perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan perbuatan asusila atau penyakit masyarakat, seperti tindakan asusila di tempat objek-objek wisata.

Perbuatan ini banyak meresahkan warga di sekitar, untuk menghilangkan pandangan negatif dimata masyarakat, yang mana tempat wisata cenderung untuk berbuat asusila seperti di lokasi *Benteng Fort De Kock*, Lobang Jepang dan beberapa tempat lainnya. Umumnya yang berbuat asusila itu remaja, jika tempat wisata sering dirazia karena selalu dijadikan tempat asusila maka orang luar mungkin tidak berani datang ke daerah ini. Dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan asusila diperlukan upaya-upaya untuk memberantas segala tindakan yang berbau maksiat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat tersebut, bahwa perbuatan asusila didefinisikan sebagai hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrama kesopanan, sedangkan akibat hukumya belum bagi si pelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada.[1] Semenjak Peraturan Daerah itu tersebut ditetapkan, memang nampak adanya penanganan masalah maksiat yang dilakukan oleh pemerintah Bukittinggi.

---

[1] *Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003 tentang penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat.* Bab I Pasal (7)

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengatasi persoalan perbuatan asusila di tempat objek wisata yang dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan terutama dalam hal kuantitas. Setelah dilakukan penelitian tersebut, akhirnya didapatkan strategi yang digunakan pemko dalam mengatasi maraknya perbuatan asusila di tempat objek wisata.

1 Membuat kebijakan untuk memberantas perbuatan asusila sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
2. Meningkatkan intensitas razia
3. Melakukan tindakan hukum yang tegas dan pemberian hukuman maksimal bagi pelaku yang berbuat asusila di tempat objek wisata
4. Melibatkan seluruh instansi atau komponen masyarakat untuk membantu pelaksanaan pemberantasan perbuatan asusila di tempat objek wisata.

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan pemko Bukittinggi sudah baik tetapi cara mengimplementasikan kebijakan tersebut kurang baik karena masih banyak terdapat kendala dalam melaksanakan pengawasan pemberantasan perbuatan asusila di objek wisata sebagaimana hambatan atau kendala tersebut adalah:

1. Kurangnya perhatian dan keterlibatan serta respeksitas dari instansi-insansi terkait ataupun kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dalam pengawasan Kota Bukittinggi yang bebas dari berbuatan maksiat. Jangan sampai pihak kantor Satpol PP bertindak sendiri dalam mengimplentasikan peraturan daerah tersebut padahal tujuan kebijakan ini adalah untuk kepentingan dan kemajuan bersama.
2. Kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait langsung, tidak hanya disebabkan oleh kesadaran instansi terkait untuk melibatkan diri dalam penertiban ini, namun dari segi pendanaan mengakibatkan kantor Sat Pol PP memiliki kendala karena dana yang disediakan dalam DASK (Dana Anggaran Satuan Kerja) mereka hanya terbatas dalam penyelenggaran dan implementasi kebijakan yang bersifat ketertiban, kebersihan dan keamanan semata dalam artian, pertimbangan alokasi dana tidak mempertimbangkan aspek teknis lainnya, seperti anggaran untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Dispenda, bahkan pemerintah Kota Bukittinggi sendiri.
3. Jangan sampai pihak yang bertanggung jawab memyelamatkan pelaku yang berbuat asusila, seperti kasusnya jika pelaku kenal dengan anggota Satpol PP, maka pihak sat Pol PP memberi tau kalau akan ada razia di tempat objek wisata.
4. Terdapatnya pemerasan dari anggota Satpol PP terhadap pelaku yang berbuat asusila yang tertangkap basah, sehingga anggota meminta uang kepada pelaku agar pelaku bisa bebas dan tidak menjalani hukuman atau membayar denda sebagaimana ketentuan yang berlaku yang telah

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

Bryson, Jhon M., 1999, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Budi, Winarno. 2002.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta.

Foucault, Michael, 1997, *Sejarah Seksualitas : Seks Dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Koentjoro, 2002, On The Spot : *Tutur Dari Sang Pelaku Maksiat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

N. Dunn, William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity Press.

Nugroho ,Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta : Gramedia.

Paselong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik.* Alfabeta, Makakasr

Plano, Jack, 1985, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta.

Schoder, Peter. 2004. *Strategi Politik*,. Frederich Stifing, Jakarta

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wagner, Lola & Yatim, Danny Irawan, 1997, *Seksualitas Di Pulau Batam*, Sinar Harapan, Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Media Presindo

Metode

Bungin ,Burhan, 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____ . 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif.* Surabaya : Airlangga University Press.